

**PARTISIPASI MASYARAKAT PERKOTAAN
DALAM PENATAAN LORONG GARDEN KOTA MAKASSAR**

**ARIE SAPUTRI
P1300216011**



**SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN
MANAJEMEN PERKOTAAN
MAKASSAR
2020**

**PARTISIPASI MASYARAKAT PERKOTAAN
DALAM PENATAAN LORONG GARDEN KOTA MAKASSAR**

Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi
Manajemen Perkotaan

Disusun dan diajukan oleh

ARIE SAPUTRI

kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

PARTISIPASI MASYARAKAT PERKOTAAN DALAM PENATAAN LORONG GARDEN KOTA MAKASSAR

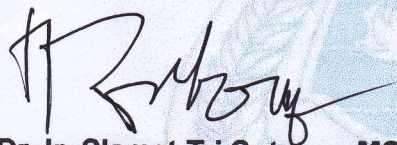
Disusun dan diajukan oleh

ARIE SAPUTRI
P1300216011

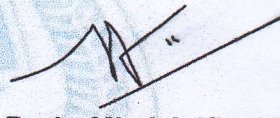
Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 27 Oktober 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Komisi Penasehat

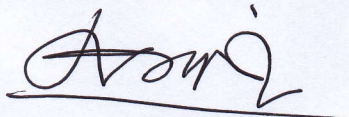


Prof. Dr. Ir. Slamet Tri Sutomo, MS
Ketua



Dr. Ir. Mimi Arifin, M.Si
Anggota


Ketua Program Studi
Manajemen Perkotaan



Dr. Ir. Arifuddin Akil, MT



Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Arie Saputri


Nomor Mahasiswa : P1300216011

Program Studi : Manajemen Perkotaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Masamba, 27 Oktober Yang
menyatakan




Arie Saputri

PRAKATA

Alhamdulillah robbil alamin, segala puji bagi Allah SWT, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Partisipasi Masyarakat Perkotaan Dalam Penataan Lorong Garden Kota Makassar”.

Tesis ini disusun sebagai syarat akademis untuk mencapai gelar Magister pada program studi Manajemen Perkotaan. Selama proses penyusunan tesis ini, penulis mengalami banyak kendala namun semuanya dapat terlewati berkat usaha penulis yang disertai dengan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Dengan segala ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Slamet Tri Sutomo, MS** selaku Ketua Komisi Penasehat dan Ibu **Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin, M.Si** selaku Anggota Komisi Penasehat untuk waktu serta kesabarannya atas bimbingan, petunjuk dan arahan yang sangat berguna bagi proses penulisan ini.
2. Bapak **Mukti Ali, ST., MT., Ph.D**, Bapak **Drs. Hasbi, M.Si., Ph.D** dan Bapak **Dr. Eng. Abdul Rahman Rasyid, ST., M.Si** selaku penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengujian dan masukan yang sangat bermanfaat dalam melengkapi penulisan ini.
3. Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc**, Wakil Dekan, segenap pegawai di Bagian Akademik, terkhusus **Ibu Susy Asteria Irafany, ST.**
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, **Ibu Bupati Luwu Utara** yang telah memberikan izin tugas belajar untuk melanjutkan studi di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Program Studi MaP angkatan 2016 yang selalu memberikan penulis masukan dan motivasi.

Secara khusus penulis persembahkan kepada segenap keluarga tercinta, Ayahanda **Drs. H. Arifin Junaidi, MM** dan Ibunda **Hj. Rafika Said** atas limpahan doa serta kasih sayang. Suamiku tercinta **Arvan, ST** dan ananda tersayang **Alula Nasyitha. Arvan** dan **Alyandra Putra. Arvan** atas pengertian, doa, spirit dan segalanya selama proses penyelesaian studi ini. Saudara tercinta **H. Ajie Saputra, S.Sos., MM, Muh. Rizha, S.St** dan terkhusus saudariku **dr. Ismi Hardianti. Arifin** atas bantuannya selama proses penelitian ini dilaksanakan.

Penulis menyadari dalam tesis ini masih terdapat banyak kekurangan baik itu dari segi penulisan, isi dan lain sebagainya, sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan guna perbaikan untuk hari yang akan datang. Sekian prakata penulis, dengan harapan semoga tulisan sederhana ini dapat diterima dan bermanfaat bagi pembaca.

Masamba, 27 Oktober Yang
Penulis

Arie Saputri

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGAJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Lingkup Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	7

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Partisipasi Masyarakat	9
1. Pengertian.....	9
2. Tujuan Partisipasi.....	9
3. Manfaat partisipasi	10
4. Bentuk-Bentuk Partisipasi	11
5. Prinsip-Prinsip Partisipasi.....	12
6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat.....	13
7. Tingkatan Partisipasi Masyarakat	14
8. Derajat Partisipasi Masyarakat.....	17

B. Karakteristik Masyarakat Perkotaan	23
1. Pengertian Masyarakat Perkotaan	23
2. Struktur Masyarakat Perkotaan	23
C. Program Lorong Garden.....	25
D. Penelitian Terdahulu.....	27
E. Kerangka Pikir	30

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	31
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	31
C. Populasi dan Sampel.....	35
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Variabel Penelitian.....	37
F. Teknik Analisis Data	38
G. Definisi Operasional	40

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian	42
1. Kelurahan Lette	42
2. Kelurahan Lariangbangi	42
3. Kelurahan Kassi-kassi.....	43
B. Karakteristik Responden	44
1. Jenis kelamin responden.....	44
2. Usia responden	44
3. Tingkat pendidikan responden	45
4. Jenis pekerjaan responden	46
C. Hasil Analisis dan Pembahasan	47
1. Analisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat pada program Longgar berdasarkan persepsi pemangku kepentingan.....	47
2. Faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan program Lorong Garden.....	65
3. Strategi keberlanjutan program Longgar dalam mendukung RTH Kota Makassar	76

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Skor Tingkat Partisipasi Masyarakat	39
Tabel 3.2	Penilaian Skala Likert	39
Tabel 4.1	Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	44
Tabel 4.2	Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia	44
Tabel 4.3	Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	45
Tabel 4.4	Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan..	46
Tabel 4.5	Hasil Penilaian Tingkat Partisipasi Menggunakan Skala Likert	61
Tabel 4.6	Hasil Pengujian Regresi Faktor Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat Dengan SPSS	63
Tabel 4.7	Faktor-Faktor Keberhasilan dan Ketidakberhasilan	74
Tabel 4.8	Faktor-Faktor Internal Keberlanjutan Program Lorong Garden	76
Tabel 4.9	Pembobotan Faktor-Faktor Internal	77
Tabel 4.10	Faktor-Faktor Eksternal Keberlanjutan Program Lorong Garden.....	79
Tabel 4.11	Pembobotan Faktor-Faktor Eksternal	80
Tabel 4.12	Pembobotan Dan Rating IFE (Internal Factor Evaluation)	81
Tabel 4.13	Pembobotan Dan Rating EFE (External Factor Evaluation)	83
Tabel 4.14	Matrik Swot (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats)	84
Tabel 4.15	Matriks Space Analysis	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Derajat Partisipasi Masyarakat	17
Gambar 2.2	Kerangka Pikir Penelitian	30
Gambar 3.1	Peta Lokasi Kelurahan Lette	32
Gambar 3.2	Peta Lokasi Kelurahan Lariangbangi	33
Gambar 3.3	Peta Lokasi Kelurahan Kassi-Kassi	34
Gambar 4.1	Distribusi Persepsi Pengetahuan Masyarakat Terhadap Program Lorong Garden	48
Gambar 4.2	Distribusi Persepsi Lama Pengetahuan Masyarakat Terhadap Program Lorong Garden	49
Gambar 4.3	Distribusi Persepsi Terhadap Intensitas Mengikuti Rapat Program Lorong Garden	50
Gambar 4.4	Distribusi Persepsi Masyarakat Terhadap Pemberian Informasi Kepada Pemerintah Kota Terkait Program Lorong Garden	51
Gambar 4.5	Distribusi Persepsi Masyarakat Terhadap Partisipasi Dalam Bentuk Ide Terhadap Pembangunan Lorong Garden	52
Gambar 4.6	Distribusi Persepsi Terhadap Implementasi Ide Masyarakat/Pemangku Kebijakan Untuk Pembangunan Lorong Garden	53
Gambar 4.7	Distribusi Persepsi Masyarakat Terhadap Partisipasi Dalam Bentuk Keuangan Terhadap Pembangunan Lorong Garden	54
Gambar 4.8	Distribusi Persepsi Masyarakat Terhadap Partisipasi Dalam Bentuk Tenaga Terhadap Pembangunan Lorong Garden	55
Gambar 4.9	Distribusi Persepsi Masyarakat Terhadap Partisipasi Dalam Bentuk Barang Terhadap Pembangunan Lorong Garden	56
Gambar 4.10	Distribusi Persepsi Masyarakat Terhadap Partisipasi Dalam Bentuk Waktu Terhadap Pembangunan Lorong Garden	57

Gambar 4.11	Distribusi Persepsi Masyarakat Terhadap Partisipasi Dalam Pemeliharaan Lorong Garden Setiap Minggu	58
Gambar 4.12	Distribusi Persepsi Masyarakat Terhadap Kepedulian Masyarakat Pada Pembangunan Lorong Garden	59
Gambar 4.13	Distribusi Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Lorong Garden	60
Gambar 4.14	Distribusi Persepsi Masyarakat Terkait Manfaat Lorong Garden	65
Gambar 4.15	Distribusi Persepsi Masyarakat Terkait Manfaat Lorong Garden untuk Kota Hijau (Green City)	66
Gambar 4.16	Distribusi Persepsi Masyarakat Terkait Kondisi Lorong Garden	67
Gambar 4.17	Distribusi Persepsi Masyarakat Terkait Pengawasan Lorong Garden	68
Gambar 4.18	Distribusi Persepsi Masyarakat Terkait Pemeliharaan Lorong Garden	69
Gambar 4.19	Penataan tanaman di Kel. Lette	70
Gambar 4.20	Penataan lorong di Kel. Lette.....	70
Gambar 4.21	Bank Sampah di Kel. Lette	71
Gambar 4.22	Kondisi lorong di Kel. Lariangbangi	71
Gambar 4.23	Penataan tanaman di Kel. Lariangbangi	71
Gambar 4.24	Penataan tanaman di Kel. Lariangbangi	72
Gambar 4.25	Kondisi lorong di Kel. Kassi-kassi	72
Gambar 4.26	Penataan tanaman di Kel. Kassi-kassi	72
Gambar 4.27	Penataan tanaman di Kel. Kassi-kassi	73
Gambar 4.28	Penataan tanaman di Kel. Kassi-kassi	73
Gambar 4.29	Bank sampah di Kel. Kassi-kassi	73
Gambar 4.30	Diagram Matrik IE (Internal-Eksternal)	89
Gambar 4.31	Diagram Matrik Space Analysis	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Variabel dan Indikator Penilaian Bentuk dan Partisipasi Masyarakat	101
Lampiran 2	Kuesioner Responden	110
Lampiran 3	Hasil Pengujian Regresi Faktor Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat Dengan SPSS	115

ABSTRAK



ARIE SAPUTRI. *Partisipasi Masyarakat Perkotaan dalam Penataan Lorong Garden Kota Makassar* (dibimbing oleh Slamet Tri Sutomo dan Mimi Arifin).

Program Lorong Garden dilaksanakan di setiap wilayah kecamatan di Kota Makassar dengan kondisi lokasi berbeda-beda yang mengoptimalkan masyarakat sebagai pelaku. Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat sangat dibutuhkan dalam program penataan Lorong Garden tersebut.

Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat partisipasi masyarakat. Jenis penelitian dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data diperoleh dengan penyebaran kuesioner secara non-probability sampling, observasi lapangan, wawancara dan visualisasi. Adapun variabelnya meliputi: partisipasi dalam pengambilan keputusan, keikutsertaan dalam pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan serta pemeliharaan dan pengawasan Lorong Garden. Pengukuran tingkat partisipasi menggunakan skala Likert dengan uji statistik SPSS. Analisis strategi keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan dikaji menggunakan SWOT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada Program Lorong Garden berada pada tingkatan pemberitahuan/informing (berdasarkan teori Arnstein), terbukti masyarakat hanya sekedar memberikan informasi namun belum tentu diimplementasikan. Bentuk partisipasi masyarakat memiliki karakteristik dan perbedaan masing-masing terutama pada proses perencanaan dan pelaksanaan. Faktor penyebab keberhasilan memiliki perbedaan signifikan terutama dari segi kondisi dan bentuk pemeliharaan masyarakat, sedangkan faktor penyebab ketidakberhasilan karena belum mengoptimalkan aspek keberlanjutan manfaat ekonomi, kondisi Lorong Garden hanya bersih (khususnya di Kelurahan Lariangbangi) dan pengawasan tergolong masih rendah. Strategi keberlanjutan program Lorong Garden dengan menggunakan SWOT menunjukkan strategi intensif berupa pengembangan secara berkelanjutan, optimalisasi pemeliharaan berbasis eco green serta kerjasama lintas sektor dalam pembangunan.

Kata kunci: *partisipasi masyarakat, lorong garden*

	
GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) SEKOLAH PASCASARJANA UNHAS	
Abstrak ini telah diperiksa.	Paraf Ketua / Sekretaris,
Tanggal: 30.11.2020	

ABSTRACT



ARIE SAPUTRI. *Urban Community Participation in the arrangement of Makassar City Hallways* (supervised by Slamet Tri Sutomo and Mimi Arifin).

The Lorong Garden Program was implemented in each Subdistrict Area in the Makassar City. With different location and conditions that optimize the community as actors, that community participation is needed in the Lorong Garden Program.

This study aims to analyze the level of community participation. This type of research uses a quantitative descriptive approach. Data gathering was done by distributing questionnaires, and sample selected by Non-Probability Sampling, field observations, interviews and visualization. The variables covers: participation in decision making, participation in development, utilization of development results as well as maintenance and supervision of Lorong Garden. Measuring the level of participation using the Likert scale with the SPSS statistical test. Analyzing the social, economic and environmental sustainability strategies assessed using SWOT.

The results showed that the level of community participation in the Lorong Garden program was at the level of notification/informing (according to Arnstein), because the community only provided information but it was not really implemented. The forms of community participation have their respective characteristics and differences, especially in the planning and implementation processes. The factors that cause success have significant differences, especially in terms of conditions and forms of community maintenance, while the factors that cause failure to optimize the sustainability of economic benefits, Lorong Garden is only clean (especially in Lariangbangi Village) and supervision is still low level. The sustainability strategy of the Lorong Garden program using SWOT shows an intensive strategy of developing Lorong Garden in a sustainable manner, optimizing eco-green-based maintenance and cross-sectoral cooperation in development.

Keywords: *community participation, lorong garden*

	GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) SEKOLAH PASCASARJANA UNHAS
Abstrak ini telah diperiksa.	Paraf Ketua/Sekretaris,
Tanggal: <u>30.11.2020</u>	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sebuah kota merupakan perwujudan aktifitas manusia yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu, hal ini berarti bahwa sebuah kota akan berkembang dari sebuah titik kecil yang kemudian akan tumbuh menjadi semakin besar. Dan seiring perkembangan tersebut terdapat nilai yang perlu dipertimbangkan, beberapa diantaranya adalah nilai sosial masyarakat, budaya, lingkungan dan ekonomi. Kota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen (Bintarto, 1983).

Perkembangan perkotaan di Indonesia pada saat ini dihadapkan pada pertumbuhan kota yang sangat pesat yang memicu degradasi kualitas lingkungan permukiman yang diikuti dengan berbagai permasalahan eksternalitas negatif, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, pencemaran sungai, kemacetan, kekumuhan dan krisis infrastruktur. Tantangan ke depan bagi kota-kota di Indonesia pun akan semakin berat dengan hadirnya parameter perubahan iklim (climate change) dan semakin terbatasnya sumber daya pendukung kehidupan (finite resources).

Pesatnya perkembangan dan pertumbuhan kota dengan lahan perkotaan yang terbatas, menyebabkan ruang perkotaan yang tersedia sudah tak mampu memenuhi kebutuhan yang meningkat tajam. Pertumbuhan perumahan dan bangunan-bangunan yang terus meningkat, tapi cenderung tidak rasional tersebut menyebabkan terjadi pembangunan tidak terkendali/terkontrol. Kondisi ini dapat menimbulkan kerusakan/degradasi lingkungan. Kondisi tersebut mengakibatkan kota semakin tidak nyaman untuk beraktivitas, oleh karena itu rencana tata

ruang diharapkan mampu menekan perkembangan dan pembangunan di perkotaan. Pembangunan kota yang tidak terencana dan tidak tertata dengan baik akan menimbulkan banyak permasalahan, baik fisik, sosial maupun ekonomi yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi.

Demikian pula dengan desakan penduduk yang semakin tinggi terhadap lahan yang terbatas akan menyebabkan tumbuhnya pemanfaatan ruang di luar batas toleransi seperti penebangan vegetasi dan mengubah lahan yang semula menjadi hunian penduduk dengan segala kegiatan penunjang lainnya. Hal tersebut akan menimbulkan masalah ketidakseimbangan lingkungan. (Hestin 2011:32). Berbagai permasalahan, terutama degradasi lingkungan, khususnya lingkungan perkotaan tidak terlepas dari keberadaan ruang terbuka hijau. Untuk itu Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam bentuk program pembangunan termasuk berbagai sistem pembangunan yang terpadu untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul, program-program tersebut kemudian dituangkan dalam RTRW.

Roger Trancik (1986) membagi ruang terbuka kota menjadi dua yakni hard space dan lost space, hard space yaitu ruang terbuka yang dibatasi oleh dinding arsitektural sedangkan lost space yaitu ruang terbuka yang didominasi oleh lingkungan alam. Menurut Heinz (2007) Setiap kawasan membutuhkan tata ruang berdasarkan pengaturan ruang, artinya, dan maknanya. Suatu kawasan/kota yang tumbuh liar dan tidak teratur akan kehilangan anggota tubuhnya yang vital seperti jantung, paru-paru, hati, dan sebagainya. Tanpa paru-paru penghijauan (taman dan hutan kota) maka kota tidak dapat bernapas lagi. Rencana induk (masterplan) kawasan/kota seharusnya mengandung minimal 20% luas tanah untuk dijadikan taman dan hutan kota.

Menurunnya kuantitas serta kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringnya terjadi banjir di perkotaan, tingginya polusi udara, dan bertambahnya kerawanan sosial serta berkurangnya produktivitas

masyarakat akibat stress karena terbatasnya ruang yang tersedia bagi interaksi sosial. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya. Secara sistem, RTH kota adalah bagian kota yang tidak terbangun, yang berfungsi menunjang keamanan, kesejahteraan, peningkatan kualitas lingkungan dan pelestarian alam. Umumnya terdiri dari ruang pergerakan linear atau koridor dan ruang pulau atau oasis (Spreigen, 1965). Atau path sebagai jalur pergerakan dan room sebagai tempat istirahat, kegiatan atau tujuan (Krier, 1979). Dapat berbentuk buatan manusia dan alam yang terjadi akibat teknologi, seperti koridor jalan dan pejalan kaki, bangunan tunggal dan majemuk, hutan kota, aliran sungai, dan daerah alamiah yang telah ada sebelumnya. Ringkasnya, totalitas kesatuan yang memiliki keterkaitan dan dapat digunakan sebagai sistem orientasi. Menurut Roger Trancik (1986) RTH merupakan ruang yang didominasi oleh lingkungan alami di luar maupun di dalam kota, dalam bentuk taman, halaman, areal rekreasi kota dan jalur hijau.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan khususnya lingkungan maka Pemerintah mengeluarkan Undang – undang nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, antara lain telah mengamanatkan secara tegas bahwa 30% dari wilayah kota/kawasan perkotaan harus berwujud Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan komposisi 20% RTH Publik dan 10% RTH Private. Preskripsi RTH 30% tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota dan termuat didalam Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW Kota, serta terkait penyediaan RTH telah diatur dalam Permen PU No. 5 Tahun 2008.

Kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia Timur dengan pembangunan yang cukup pesat dan pertumbuhan kota

yang terus berkembang, yang membutuhkan seribu ha lebih tanah yang belum terbangun untuk RTH (Jurnal Hutan Dan Masyarakat). Saat ini RTH kota Makassar masih di bawah 30%, artinya ada kesenjangan antara luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang ada dengan yang ingin dicapai.

Problem mendasar terkait penyediaan RTH di Kota Makassar yang intensitas pembangunan tinggi berjalan sejajar dengan ketersediaan lahan perkotaan untuk penyediaan RTH sehingga dibutuhkan berbagai alternatif penataan RTH di Kota Makassar agar ketersediaan RTH di Kota Makassar dapat terpenuhi, karena itu dibutuhkan suatu konsep pembangunan terkait penyediaan RTH yang didasarkan pada regulasi maupun teori-teori dan fakta di lapangan, idealnya di Kecamatan tersebut segera meningkatkan penyediaan RTH minimal sebesar 30% dari luas wilayah seperti yang telah diamanatkan Undang – undang nomor 26 Tahun 2007 dan RTRW Kota Makassar 2015-2034, salah satu yang dikembangkan adalah jalur hijau jalan.

Berdasarkan visi dan misi Walikota Makassar periode 2014-2019, antara lain merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia dan merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman berstandar dunia (Asmin, 2016). Sehingga salahsatu konsep jalur hijau jalan yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Makassar adalah Program Lorong Garden. Berdasarkan kondisi infrastruktur Kota Makassar didominasi oleh lorong (gang kecil) yang menjadi sel inti Kota Makassar, sehingga membangun gang atau lorong sama dengan menciptakan Kota. Program Lorong Garden bertujuan untuk menjaring partisipasi masyarakat agar ikut berperan penting mengubah lingkungan tempat tinggalnya menjadi lebih layak huni.

Tiga alasan utama pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Conyers (1991), yaitu: (1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan serta sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya

program pembangunan dan proyek akan gagal, (2) Masyarakat mempercayai program pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk beluk proyek dan merasa memiliki proyek tersebut, (3) Partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di pembangunan (Marlita & Hismendi, 2018).

Program Lorong Garden tersebar di Setiap Wilayah Kecamatan di Kota Makassar dengan kondisi lokasi yang berbeda-beda, dengan mengoptimalkan masyarakat sebagai pelaku. Keberhasilan suatu program berbasis pemberdayaan masyarakat tidak akan dapat berjalan optimal tanpa partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam melakukan manajemen penyelenggaraan program yang maksimal, hal ini berarti peran penting partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam program penataan Lorong Garden. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat terhadap penyediaan jalur hijau jalan melalui penataan Lorong Garden, dengan membandingkan dari tiga jenis lokasi yang ada di Kota Makassar. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui bagaimana bentuk partisipasi yang terbangun serta keberlanjutan Program Lorong Garden.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat pada program Lorong Garden berdasarkan persepsi pemangku kepentingan?
2. Faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan program Lorong Garden?
3. Bagaimana strategi keberlanjutan program Lorong Garden dalam mendukung RTH Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan masalah penelitian tersebut, maka tujuan yang ingin didapatkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat pada program Lorong Garden berdasarkan persepsi pemangku kepentingan.
2. Menganalisis faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan program Lorong Garden.
3. Menganalisis strategi keberlanjutan program Lorong Garden dalam mendukung RTH Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek keilmuan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran dan bahan pertimbangan terkait konsep keberlanjutan program Lorong Garden kaitannya dengan kebijakan Manajemen Perkotaan khususnya pada permukiman kepadatan tinggi untuk memanfaatkan ruang yang sempit dalam menyediakan jalur hijau, dengan melihat faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan program tersebut, serta tingkat partisipasi masyarakat perkotaan Kota Makassar terhadap penataan Lorong Garden.

2. Aspek guna laksana

- a. Bagi pemerintah, Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Makassar terhadap fenomena pelibatan aktif masyarakat perkotaan melalui partisipasi pada kegiatan penataan Lorong Garden.
- b. Bagi masyarakat, memberi gambaran bagi masyarakat mengenai penataan Lorong Garden dan bentuk partisipasi yang optimal dalam membangun lingkungan permukiman melalui penataan Lorong Garden serta keberlanjutan keberhasilan program tersebut.

E. Lingkup Penelitian

1. Lingkup Wilayah Studi

Lingkup wilayah studi difokuskan pada tiga objek penelitian, di kawasan pesisir kota Makassar yaitu Kelurahan Lette Kecamatan Mariso, Kawasan Pusat Kota Kelurahan Lariangbangi Kecamatan Makassar dan kawasan pinggiran Kota Makassar yaitu Kelurahan Kassi – kassi Kecamatan Rappocini. Alasan pemilihan lokasi untuk melihat partisipasi masyarakat berdasarkan karakteristik wilayah yang ada di Kota Makassar.

2. Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dari penelitian ini mencakup pada bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat pada program Lorong Garden berdasarkan persepsi pemangku kepentingan, faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan program tersebut, serta strategi keberlanjutan program Lorong Garden dalam mendukung RTH Kota Makassar.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara umum tentang isi proposal ini, penulis menyajikan dalam bentuk sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bagian pertama berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup wilayah studi dan materi serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bagian kedua akan membahas tentang rujukan teori dan materi yang berhubungan/memperkuat pengambilan keputusan/interpretasi dan identifikasi terhadap data dan analisa yang akan dilakukan.

BAB III Metode Penelitian

Bagian ketiga menjelaskan tentang jenis, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian, teknik analisis, dan definisi operasional.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bagian keempat, pembahasan mencakup gambaran umum lokasi penelitian, serta pemaparan hasil penelitian yang terdiri dari analisis dengan metode deskriptif kuantitatif, yakni menggunakan teknik scoring. Selanjutnya menggunakan uji signifikansi menggunakan SPSS, dan analisis SWOT.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan serta saran-saran mengenai tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat terhadap program Lorong Garden.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian

Menurut Adisasmita (dalam Sahria, 2018) Partisipasi anggota masyarakat yaitu keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan didalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat.

Sedangkan menurut Isbandi (dalam Sahria, 2010) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk mengenai masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

2. Tujuan Partisipasi

Tujuan partisipasi menurut Schiller dan Antolv yang dikutip oleh Sahria, 2010, tujuan partisipasi adalah sebagai berikut:

a. Menciptakan visi bersama

Merumuskan misi dan mandate serta nilai-nilai yang dianut atau menjadi dasar suatu organisasi serta visi itu kedepan. Tujuannya adalah untuk menyajikan kebenaran yang definit, tapi lebih untuk menstimulasi debat serta bagaimana mempengaruhi ke masa depan.

b. Membangun rencana

Perumusan visi bersama akan melahirkan tujuan spesifik yang akan dicapai. Tujuan tersebut menjadi acuan bagi tahap selanjutnya dalam membangun rencana.

c. Mengumpulkan gagasan

Kegiatan ini dilakukan dengan cara lisan dan tertulis. Bertujuan mengumpulkan sebanyak mungkin ide dari semua orang yang menjadi peserta tahap partisipasi.

d. Menentukan Prioritas/Membuat Pilihan

Bertujuan untuk mengorganisir berbagai masukan yang muncul dalam proses partisipasi dengan memanfaatkan metode kualitatif.

e. Menjaring Aspirasi/Masukan

Bertujuan untuk pertukaran informasi, ide dan kepedulian tentang suatu isu atau rencana antara pemerintah, perencana dengan masyarakat. Melalui proses ini masyarakat mendapatkan kesempatan untuk mempengaruhi perumusan kebijakan, memberikan alternatif desain, pilihan investasi dan pengelolanya.

f. Mengumpulkan Informasi/Analisis Situasi

Bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, peluang dan bagaimana mengoptimalkan kelemahan serta ancaman untuk memudahkan perumusan langkah untuk mengatasinya.

3. Manfaat partisipasi

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang penting karena berkaitan langsung dengan hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfokus bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Menurut Thomsen yang dikutip oleh (Nuring,2013) memaparkan manfaat dari partisipasi masyarakat yaitu:

a. Partisipasi memperluas basis pengetahuan dan representasi.

b. Partisipasi membantu terbangunnya transparansi komunikasi serta hubungan-hubungan kekuasaan di antara para stakeholders.

c. Partisipasi dapat meningkatkan pendekatan literative dan siklikal dan menjamin bahwa solusi didasarkan pada pemahaman dan pengetahuan lokal.

d. Partisipasi akan mendorong kepemilikan lokal, komitmen serta

akuntabilitas. Pelibatan masyarakat lokal bisa membantu terciptanya hasil (outcome) yang berkelanjutan dengan memfasilitasi kepemilikan masyarakat terhadap proyek dan menjamin bahwa aktivitas-aktivitas yang mengarah pada keberlanjutan akan terus berlangsung. Hasil yang diperoleh dari usaha-usaha kolaboratif lebih mungkin untuk diterima bagi seluruh stakeholders.

- e. Partisipasi dapat membangun kapasitas masyarakat dan modal sosial. Pendekatan partisipatif akan menambah pengetahuan dari tiap stakeholders tentang kegiatan/aksi yang dilakukan oleh stakeholders lain.

4. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Telah disinggung sebelumnya bahwa secara sederhana partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam proses pembangunan. Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa seseorang, kelompok, atau masyarakat dapat memberikan kontribusi/sumbangan yang sekiranya bisa menunjang keberhasilan dari sebuah proyek/program pembangunan. Secara umum partisipasi masyarakat dapat dilihat dari bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai berikut (Nuring, 2013):

- a. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam *anjang sono*, pertemuan atau rapat;
- b. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan

untuk orang lain dan sebagainya;

- c. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan maupun pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya;
- d. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong beraneka ragam bentuk usaha dan industri;
- e. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda paguyuban.

5. Prinsip-Prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi adalah mendorong setiap warga menggunakan hal menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang terkait kepentingan masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Analisis partisipatif ini dilakukan untuk memahami suara masyarakat miskin, laki-laki dan perempuan, tentang masalah kemiskinan yang mereka hadapi dan mengakomodasikan suara masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan. Berikut adalah prinsip-prinsip dalam partisipasi masyarakat:

- a. Cakupan: semua orang atau perwakilan dari semua kelompok yang terkena dampak proyek pembangunan keputusan atau proses.
- b. Kesetaraan dan kemitraan (*Partnership Equal*): Pada dasarnya setiap orang memiliki keterampilan, kemampuan, dan hal untuk menggunakan inisiatif dalam terlibat pada setiap proses dialog dalam rangka membangun, terlepas dari tingkat dan struktur masing-masing pihak.
- c. Transparansi: Semua pihak harus dapat mengembangkan komunikasi yang terbuka dan kondusif sehingga dialog dihasilkan.
- d. Pihak berwenang kesetaraan (*Power Sharing/Equal Powership*): Berbagai pihak yang terlibat harus bisa menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan agar menghindari dominasi.
- e. Tanggung jawab kesetaraan (*Responsibility*): Berbagai pihak memiliki tanggung jawab yang jelas dalam setiap tahapan karena

kesetaraan otoritas (pembagian kekuasaan) dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan serta langkah-langkah pemberdayaan berikutnya.

- f. Pemberdayaan: Keterlibatan berbagai pihak tidak dapat dipisahkan dari semua kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak, sehingga dengan keterlibatan aktif dalam kegiatan proses, ada proses saling belajar serta saling kerjasama untuk memberdayakan satu sama lain.
- g. Dibutuhkan kerjasama dari semua pihak yang terlibat untuk berbagi kelebihan agar meminimalkan mereka, khususnya yang terkait dengan kemampuan sumber daya manusia.

6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program, sifat faktor-faktor ini dapat mendukung program yang sukses, tetapi ada juga sifat yang menghambat keberhasilan program. Ross, 1967 (dalam Jatmiko, 2017) mengatakan bahwa partisipasi berkembang dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang agar berpartisipasi, yaitu:

a. Usia

Faktor usia adalah faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan masyarakat yang ada. Orang dari kelompok usia menengah dengan lampiran moral terhadap nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang lebih stabil, cenderung lebih mungkin untuk berpartisipasi dibandingkan kelompok usia lainnya.

b. Jenis Kelamin

Nilai panjang dominan dalam budaya berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya seorang wanita adalah “di dapur” yang berarti bahwa di banyak masyarakat peran perempuan, terutama mengurus rumah tangga, tetapi nilai bagi peran perempuan telah bergeser oleh gerakan emansipasi serta pendidikan perempuan

semakin baik.

c. Pendidikan

Merupakan salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi karena dianggap mempengaruhi sikap seseorang terhadap lingkungan, sikap yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan seberapa banyak pendapatan yang akan diperoleh. Pekerjaan serta penghasilan yang baik dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Memahami bahwa untuk berpartisipasi dalam kegiatan, harus didukung oleh suasana ekonomi yang stabil.

e. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang yang hidup dalam lingkungan tertentu dan pengalaman berinteraksi dengan lingkungan akan berpengaruh terhadap partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal di lingkungan tertentu, rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasi besar dalam aktivitas apapun.

7. Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Menurut Cohen dan Uphoff dikutip dalam (Rizal,2014) membagi partisipasi dalam perencanaan, Partisipasi dalam pelaksanaan, Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dan Partisipasi dalam tahap evaluasi. Berikut penjelasan masing-masing:

- a. *Participation in Decision Making* adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan organisasi. Partisipasi dalam bentuk ini berupa pemberian kesempatan bagi masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan. Masyarakat juga diberikan kesempatan dalam menilai suatu keputusan atau

kebijaksanaan yang sedang berjalan. Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah proses dimana prioritas-prioritas pembangunan dipilih serta dituangkan dalam bentuk program yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Dengan mengikutsertakan masyarakat secara tidak langsung mengalami latihan agar bisa menentukan masa depannya sendiri secara demokratis.

- b. *Participation in Implementation* adalah partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program pembangunan, bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah (banyaknya) yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang diparticipasikan misalnya tenaga, bahan, uang, semuanya atau sebagian-sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi, sekali-sekali atau berulang-ulang.
- c. *Participation in Benefit* adalah partisipasi masyarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan.
- d. *Participation in Evaluation* adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan menilai dan mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta dalam mengawasi serta menilai atau secara tidak langsung, misalnya, memberikan saran-saran, kritikan atau protes.

Pada proses penataan Lorong Garden yang telah dilaksanakan mulai tahun 2014 oleh pemerintah Kota Makassar dengan basis tanaman sayuran bertujuan untuk: (1) memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan di perkotaan, (2) mengembangkan sumber benih/bibit untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan pekarangan, dan (3) mengembangkan kegiatan

ekonomi produktif keluarga. Oleh karena itu pada kegiatan penataan Lorong Garden berbasis masyarakat dibutuhkan peran partisipasi masyarakat.

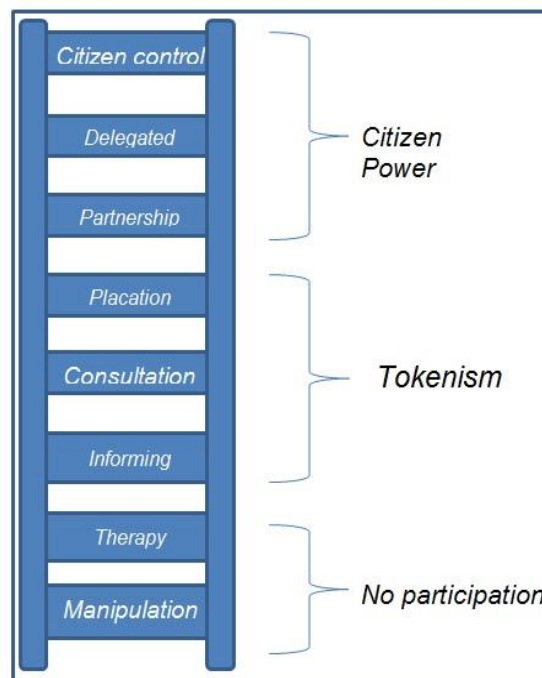
Partisipasi Masyarakat terhadap penataan Lorong Garden terdapat beberapa tingkatan apabila dikaitkan dengan pemikiran Cohen dan Uphoff (Rizal,2014), yaitu *Pertama*: partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penentuan lokasi atau gang yang dijadikan Longgar; *Kedua*: keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan Longgar; *Ketiga*: Masyarakat mampu memanfaatkan hasil dari penataan Longgar; *Keempat*: Partisipasi masyarakat dalam memelihara serta mengawasi pembangunan Longgar. Sehingga, partisipasi masyarakat pada penataan Lorong Garden secara tidak langsung akan mempengaruhi keberlanjutan program tersebut, dikarenakan pada tingkatan partisipasi masyarakat perkotaan memiliki kadar yang berbeda pada proses praktek partisipasi yang didasarkan kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir pada tingkatan dan model partisipasi masyarakat meliputi: (a) Tidak Partisipatif (*Non Participation*); (b) Derajat Semu (*Degrees of Tokenism*), dan; (c) kekuatan masyarakat (*Degrees of Citizen Powers*).

Untuk proses penentuan suatu keberhasilan maupun tidak berhasilnya suatu program berbasis pemberdayaan maka dilakukan pengukuran dengan cara mengevaluasi secara sistematis dan mengacu pada masalah pokoknya seperti dampak serta efektivitas program; apakah kebijakan itu mencapai tujuannya, apakah untung ruginya, siapakah yang memperoleh keuntungan, dan apa yang akan terjadi jika kebijakan itu tidak ada (Anderson dalam Indra Jaya, 2014). Artinya untuk melihat suatu keberhasilan dan ketidakberhasilan suatu program partisipasi khususnya pada program penataan Lorong Garden maka dilakukannya proses evaluasi terhadap program tersebut. Richard M. 1990 menyebutkan bahwa evaluatif adalah suatu

aktivitas yang bertujuan mengetahui seberapa jauh suatu kegiatan dapat dilaksanakan atautkah tidak berhasil sesuai yang diharapkan atau tidak.

8. Derajat Partisipasi Masyarakat

Terdapat kadar yang berbeda dalam setiap praktek partisipasi. Kadar ini jika diperbandingkan satu sama lain akan membentuk suatu garis kontinum mulai dari titik non partisipasi warga sampai kendali warga sepenuhnya. Untuk memperjelas mana proses yang disebut partisipasi dan bukan partisipasi dalam penelitian ini menggunakan konsep delapan tangga partisipasi masyarakat (Eight Rungs on Ladder of Citizen Participation) menurut Arnstein (1967).



Gambar 2.1 Derajat Partisipasi Masyarakat

“Sumber: Sherry R Arnstein “A Ladder of Citizen Participation”

Dalam konsepnya Arnstein menjelaskan partisipasi masyarakat yang didasarkan kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, tiap tangga dibedakan berdasarkan “*corresponding to the extent of citizen’s power in determining the plan and/or program*”. Secara umum, dalam model ini ada tiga derajat

partisipasi masyarakat, yaitu : Tidak Partisipatif (*Non Participation*), Derajat Semu (*Degrees of Tokenism*) dan kekuatan masyarakat (*Degrees of Citizen Powers*).

a. Manipulasi (Manipulation).

Pada tingkat manipulasi ini masyarakat dianggap sebagai mahluk yang tidak berdaya kemudian mereka yang berkuasa memanipulasi dengan memasukan mereka yang tidak berdaya ke dalam program-program yang sebenarnya belum tentu sesuai dengan kondisi yang ada. Masyarakat tidak berdaya disini adalah masyarakat miskin. Contohnya, masyarakat di undang kemudian didudukkan bersama mengikuti seluruh program dengan asumsi bahwa memang kegiatan tersebut harus mereka lakukan, seolah-olah memang itu suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat miskin. Padahal, itu hanya manipulasi saja agar pemenuhan kuota dalam suatu program. Asumsinya kemudian dengan datang lalu mengikuti seluruh perintah yang sudah dikemukakan masyarakat dianggap telah berpartisipasi. Maka tingkatan dalam tahap ini dianggap non – partisipasi/partisipasi rendah.

Pada program Lorong Garden dikatakan partisipasi masyarakat pada tingkatan manipulasi apabila masyarakat hanya mengikuti arahan dari Pemerintah Kota Makassar dan sekedar mengikuti sosialisasi program tanpa mengikuti seutuhnya proses dari tahapan perencanaan hingga pemanfaatan dan evaluasi, tingkatan tersebut merupakan tingkatan terendah.

b. Terapi (Therapy).

Asumsinya bahwa dilaksanakan suatu program dan masyarakat diikutseratakan mulai dari tahap perencanaan. Pada awalnya pendapat masyarakat diterima akan tetapi kemudian tidak dijalankan, karena sesungguhnya mereka sudah merencanakan jauh kedepan. Keikutsertaan masyarakat ini yang kemudian disebut

partisipasi adalah membantu mereka menjalankan apa yang kemudian sudah menjadi tujuan penguasa. Masyarakat dilibatkan bukan untuk berpartisipasi menyubangkan ide, akan tetapi sebenarnya hanya diperlukan bantuan saja, dan masyarakat sendiri tidak mengetahui bahwasanya mereka hanya diperdaya. Maka tingkatan dalam tahap ini masih dianggap non – partisipasi/ partisipasi rendah.

Pada tahapan ini, dikatakan partisipasi masyarakat pada tingkatan terapi, apabila masyarakat hanya sebatas mengemukakan pendapat terkait perencanaan program Lorong Garden, akan tetapi pada implementasi masyarakat tidak terlibat dan pembangunan hanya sesuai keinginan Pemerintah Kota Makassar.

c. Pemberitahuan (*informing*).

Pada tahap pemberitahuan sebenarnya dapat dikatakan suatu transisi antara tidak berpartisipasi dengan berpartisipasi, artinya bahwa dalam tingkatan pemberitahuan masyarakat sudah mulai membuka pintu agar turut serta dalam berpartisipasi. Hal ini dikarenakan mereka yang berkuasa melakukan sosialisasi searah. Hal ini berarti bahwa mereka memang memberikan informasi bahwasanya semua orang berhak ikut serta dalam pengambilan keputusan, mempunyai hak-hak dan tanggungjawab sebagai warga negara, akan tetapi masyarakat hanya sekedar menginformasikan atau memberitahukan saja, dimana tidak ada saluran timbal balik atau umpan balik dari mereka yang tidak memiliki kekuasaan dengan mereka yang memiliki kekuasaan. Artinya bahwa tidak terdapat suatu negoisasi. Yang paling sering digunakan dalam komunikasi satu arah seperti media, poster ataupun tanggapan terhadap suatu pertanyaan-pertanyaan. Rapat juga menjadi suatu kendaraan komunikasi satu arah dengan memberikan suatu informasi yang sederhana serta memberikan

informasi yang tidak relevan kemudian diinformasikan keseluruhan masyarakat. Maka tingkatan dalam tahap ini masih dianggap tokenisme (justifikasi)/sedang.

Pada tingkatan pemberitahuan (informing), partisipasi masyarakat dalam program Longgar masyarakat hanya sekedar menginformasikan atau memberitahukan saja keinginan untuk pembangunan Lorong Garden, namun tidak ada umpan balik dari mereka yang tidak memiliki kekuasaan dengan mereka yang memiliki kekuasaan. Artinya bahwa tidak terdapat suatu negosiasi yang utuh untuk pembangunan, sehingga masyarakat sebatas memberikan informasi yang apabila namun belum tentu diimplementasikan.

d. Konsultasi (consultation).

Disini masyarakat sudah sadar bahwa mereka memiliki hak untuk berbicara, mempunyai tanggung jawab dan mereka sudah mengemukakan pendapat-pendapatnya. Setidaknya sudah mulai dilakukan komunikasi dua arah yaitu adanya umpan balik diantara kedua belah pihak. Akan tetapi, walaupun sudah dua arah belum murni seutuhnya karena tidak ada jaminan pendapat yang mereka kemukakan didengarkan dan dipertimbangkan. Biasanya konsultasi ini dalam melakukan survey-survey tentang masyarakat setempat. Dalam tahap ini masyarakat dianggap sebagai abstraksi statistik, kemudian partisipasi yang ada diukur dengan berapa banyak orang yang menghadiri suatu pertemuan, mengisi ataupun menjawab kuesioner survey, pencapaian ini kemudian yang dianggap berpartisipasi. Tingkat partisipasi dalam tingkat ini hanya sekedar justifikasi agar segala sesuatunya disetujui. Maka tingkatan dalam tahap ini masih dianggap tokenisme (justifikasi)/sedang.

Pada tingkatan konsultasi (consultation), partisipasi masyarakat dalam program Longgar masyarakat telah melakukan komunikasi

dua arah dengan Pemerintah Kota Makassar terkait penataan Longgar, artinya masyarakat sebagai objek survei untuk proses perencanaan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, namun pada proses pemanfaatan dan pemeliharaan masyarakat tidak terlibat aktif.

e. Penentruman (*Placation*).

Dalam tingkatan tersebut masyarakat diberikan leluasa agar mengemukakan pendapatnya serta memberikan masukan-masukan. Akan tetapi jumlah pemegang kuasa masih dominan daripada masyarakat yang ikut berpartisipasi alhasil saran dan pendapatnya diterima agar mendapat legitimasi, akan tetapi belum tentu juga diterima dan dilaksanakan. Dalam tingkatan partisipasi masyarakat partisipasi tokenisme (justifikasi)/sedang.

Pada tingkatan penentruman (*Placation*), partisipasi masyarakat dalam program Longgar masyarakat telah diberikan leluasa dalam mengemukakan pendapat serta memberikan saran untuk penataan Longgar, Akan tetapi pada proses pelaksanaan dominan sesuai kebutuhan Pemerintah Kota Makassar dalam menata Longgar.

f. Kemitraan (*Partnership*).

Pada tingkat kemitraan, kekuatan yang ada mulai didistribusikan melalui negoisasi antara masyarakat ataupun warganegara dengan pemegang kekuasaan. Dalam tahap ini muncul suatu kesepakatan bahwa keduanya saling membagi tanggung jawab mulai dari tahap perencanaan sampai dalam tahap pengambilan keputusan. Dengan demikian tahap partisipasi sudah dapat dikatakan kekuatan berada di tangan masyarakat. Dapat dikatakan partisipasi masyarakat tinggi.

Pada tingkatan kemitraan (*Partnership*), masyarakat dijadikan mitra pemerintah untuk penataan Longgar, yaitu berbagai masukan masyarakat dilaksanakan hingga proses pelaksanaan, artinya masyarakat terlibat aktif mulai proses perencanaan hingga

pelaksanaan program Longgar.

g. Pendelegasian Kekuasaan (*Delegated Power*).

Pada tingkat ini, masyarakat mulai memegang kekuasaan yang cukup besar untuk menentukan program-program. Bahkan masyarakat diberikan kekuasaan hampir menyeluruh. Tingkatan partisipasi berada ditangan masyarakat, masyarakat yang mempunyai kekuatan dalam berjalannya program atau kebijakan yang ada. Hal ini berarti masyarakat memegang kartu yang signifikan dalam menjamin akuntabilitas suatu kebijakan. Selanjutnya untuk menyelesaikan suatu perbedaan atau permasalahan, pemegang kekuasaan ini harus melalui proses perundingan daripada menanggapi tekanan-tekanan yang kemudian muncul. Tingkatan partisipasi tinggi karena kekuatan ada di warga negara.

Pada tingkatan Pendelegasian Kekuasaan (*Delegated Power*), masyarakat memegang kekuasaan penuh terhadap penataan Longgar, artinya masyarakat merupakan pemegang kekuasaan mulai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan program penataan Longgar.

h. Pengawasan Masyarakat (*citizen control*).

Pada tingkat ini tingkat partisipasi masyarakat ditingkat maksimum, berarti segala sesuatu dikuasai oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat berada dalam tingkat partisipasi sempurna yaitu partisipasi yang sepenuhnya diberikan kepada masyarakat, masyarakat memiliki kendali penuh atas program atau kebijakan yang ada, masyarakat berwenang memutuskan, melaksanakan serta mengawasi. Berjalannya program sudah wewenang dari masyarakat dan masyarakat yang mengendalikan semuanya, berarti partisipasi dalam tingkatan ini adalah partisipasi tinggi.

Pada tingkatan pengawasan masyarakat (*citizen control*), masyarakat memiliki kendali penuh atas program Longgar, artinya

masyarakat berwenang memutuskan bentuk perencanaan, melaksanakan, memanfaatkan dan mengawasi program penataan Longgar secara seutuhnya.

B. Karakteristik Masyarakat Perkotaan

1. Pengertian Masyarakat Perkotaan

Masyarakat “perkotaan” yang mana kita ketahui itu selalu identik dengan sifat yang individual, materialistis, penuh kemewahan, dikelilingi gedung-gedung yang menjulang tinggi, perkantoran yang mewah serta pabrik-pabrik yang besar. Asumsi kita tentang masyarakat “perkotaan” lebih dipahami sebagai kehidupan komunitas yang memiliki sifat kehidupan dan ciri-ciri kehidupannya berbeda dengan masyarakat perdesaan. Akan tetapi kenyataannya di “perkotaan” juga masih banyak terdapat beberapa kelompok pekerja-pekerja di sektor informal, misalnya tukang becak, tukang sapu jalanan, pemulung sampai pengemis. Dan bila kita telusuri masih banyak juga terdapat perkampungan-perkampungan kumuh tidak layak huni.

2. Struktur Masyarakat Perkotaan

a. Segi Demografi

Ekspresi demografi dapat ditemui di kota-kota besar. Kota-kota sebagai pusat perdagangan, pusat pemerintahan dan pusat jasa lainnya menjadi daya tarik bagi penduduk di luar kota. Jenis kelamin dalam hal ini mempunyai arti penting, karena semua kehidupan sosial dipengaruhi oleh proporsi atau perbandingan jenis kelamin. Suatu kenyataan ialah bahwa pada umumnya kota lebih banyak dihuni oleh wanita daripada pria. Struktur penduduk kota dari segi usia menunjukkan bahwa mereka lebih banyak tergolong dalam umur produktif. Kemungkinan besar adalah bahwa mereka yang berumur lebih dari 65 tahun atau mereka yang sudah pensiun lebih menyukai kehidupan serta suasana yang lebih tenang. Suasana ini

terdapat di daerah-daerah pedesaan atau sub urban.

b. Segi Ekonomi

Struktur kota dari segi ini dapat dilihat dari jenis-jenis mata pencaharian penduduk atau warga kota. Sudah jelas bahwa jenis mata pencaharian penduduk kota adalah di bidang non agraris seperti pekerjaan-pekerjaan di bidang perdagangan, kepegawaian, pengangkutan dan di bidang jasa serta lain-lainnya. Dengan demikian struktur dari segi jenis-jenis mata pencaharian akan mengikuti fungsi dari suatu kota. Mata pencaharian masyarakat perkotaan cenderung menjadi terspesialisasi, dan spesialisasi itu sendiri dapat dikembangkan, mungkin menjadi manajer suatu perusahaan, ketua atau pimpinan dalam suatu birokrasi.

c. Segi Segregasi

Segregasi dapat dianalogikan dengan pemisahan yang dapat menimbulkan berbagai kelompok (clusters), sehingga kita sering mendengar adanya: kompleks perumahan pegawai bank, kompleks perumahan tentara, kompleks pertokoan, kompleks pecinan dan seterusnya. Segregasi ini ditimbulkan karena perbedaan suku, perbedaan pekerjaan, perbedaan strata sosial, perbedaan tingkat pendidikan dan masih beberapa sebab-sebab lainnya.

Segregasi menurut mata pencaharian dapat dilihat pada adanya kompleks perumahan pegawai, buruh, industriawan, pedagang dan seterusnya, sedangkan menurut perbedaan strata sosial dapat dilihat adanya kompleks golongan berada.

Dikota penduduknya heterogen, terdiri dari orang-orang dengan macam-macam subkultur dan kesenangan, kebudayaan mata pencaharian. Sebagai contoh dalam perilaku, dan juga bahasa, penduduk dikota lebih heterogen. Hal ini karena daya tarik dari pekerjaan, pendidikan, komunikasi serta transportasi, menyebabkan kota menarik orang-orang dari berbagai kelompok etnis untuk

berkumpul dikota.

Segregasi ini tidak akan menimbulkan masalah apabila ada saling pengertian, toleransi antara pihak-pihak yang bersangkutan. Segregasi ini dapat disengaja ataupun tidak disengaja. Disengaja dalam hubungannya dengan perencanaan kota misalnya kompleks bank, pasar dan sebagainya. Segregasi yang tidak disengaja terjadi tanpa perencanaan, tetapi akibat dari masuknya arus penduduk dari luar yang memanfaatkan ruang kota, baik dengan ijin maupun yang tidak dengan ijin dari Pemerintah Kota. Dalam hal seperti ini dapat terjadi slums. Biasanya slums ini merupakan daerah yang tidak teratur serta bangunan-bangunan yang ada tidak memenuhi persyaratan bangunan dan kesehatan. Adanya segregasi juga dapat disebabkan sewa atau harga tanah yang tidak sama. Daerah-daerah dengan harga tanah yang tinggi akan didiami oleh warga kota yang mampu sedangkan daerah dengan tanah yang murah akan didiami oleh warga kota yang berpenghasilan sedang atau kecil.

Apabila ada kompleks yang terdiri dari orang-orang yang sesuku bangsa yang mempunyai kesamaan kultur dan status ekonomi, maka kompleks ini atau clusters semacam ini disebut dengan istilah "natural areas". (<https://barudakipsb.wordpress.com/2018/10/09/struktur-dan-karakteristik-masyarakat-kota/>).

C. Program Lorong Garden

Program Lorong Garden (Longgar) merupakan salah satu program Pemerintah Kota Makassar dalam rangka penataan dan penghijauan kawasan pemukiman warga di Kota Makassar. Program Longgar dinilai dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakat Kota Makassar. Menurut Walikota Makassar, Moh. Ramdhan 'Danny' Pomanto program Lorong Garden menjadi tolak ukur apakah masyarakat Kota Makassar hidup dengan sehat atau tidak (Kompasiana, 2017).

Program Longgar merupakan upaya Pemerintah Kota Makassar dalam memperbaiki kawasan lorong atau jalan sempit di permukiman

kumuh agar menjadi lebih nyaman dan sehat. Program ini diharapkan mampu mengurangi polusi udara, meningkatkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Saat ini, jumlah lorong yang ada di Makassar mencapai 7.520 lorong yang tersebar di 15 Kecamatan, dan 153 Kelurahan. Lorong Garden dikembangkan menjadi lorong produktif yang menghasilkan berbagai tanaman bernilai ekonomis seperti cabai. Berkaitan dengan hal tersebut, ada Badan Usaha Lorong (BULO) dengan sistem koperasi yang akan membantu dalam pembinaan serta pendistribusian hasil. Selain itu, Lorong Garden merupakan upaya untuk memperbaiki kawasan agar berfungsi sebagai ruang nyaman baru dengan pendekatan penataan atau improvement.

Program penataan ini diintegrasikan dengan upaya mempercantik kawasan dengan tanaman serta berbagai fasilitas umum penunjang seperti penerangan, bak sampah, taman-taman atau pot tanaman bunga. Program ini juga diharapkan mampu berkontribusi terhadap pengurangan polusi udara melalui penghijauan di sepanjang lorong kota (Rifai, dalam Kurniawati, 2018). Ada 2 instansi yang terkait secara langsung dengan program ini. Kedua instansi tersebut yakni, Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan (DKP3) Kota Makassar dan Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan (DKP3) Kota Makassar sebagai instansi teknis yang membuat perencanaan pengembangan Lorong Garden (Longgar). Sedangkan Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Kota Makassar menurunkan petugas lapangan agar memberikan pendampingan atau pembinaan pada masyarakat atau kelompok masyarakat dalam mengembangkan Longgar di 153 Kelurahan yang ada di Kota Makassar.

Program Lorong Garden merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan keindahan tata kota. Lorong Garden (Longgar) merupakan program yang memanfaatkan lorong-lorong di Kota Makassar agar lebih produktif. Lorong-lorong ditata

agar lebih rapi, indah, bersih dan hijau dengan berbagai jenis tanaman dan fasilitas umum seperti, lampu penerangan jalan, bak sampah, dan sebagainya. Masyarakat memanfaatkan pekarangan untuk menanam tanaman-tanaman yang dapat bernilai ekonomis atau dapat dikonsumsi sehari-hari contohnya cabai.

Program longgar ini bertujuan untuk menjaring partisipasi masyarakat untuk turut berperan penting mengubah lingkungan tempat tinggalnya menjadi lebih layak huni. Lorong Garden dibangun serta dibina dengan bantuan ibu-ibu PKK untuk menghidupkan bank sampah yang diawali dengan pembangunan kesadaran masyarakat. Program ini diharapkan mampu menekan inflasi serta meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Makassar. Selain itu, diharapkan mampu untuk menumbuhkan kreatifitas dari masyarakat Kota Makassar sehingga perekonomian masyarakat meningkat.

Longgar diharapkan mampu meningkatkan rasa persaudaraan antar sesama warga lorong, sehingga tercipta Kota yang nyaman, bersih, dan indah. Pemerintah Provinsi Sulsel menyediakan bibit tanaman untuk di tanam di lorong-lorong Kota Makassar, kemudian hasil dari tanaman-tanaman di lorong tersebut akan dipasarkan melalui Badan Usaha Lorong (BULO) untuk memberikan nilai ekonomi bagi warga khususnya ibu rumah tangga yang banyak mengelola Longgar.

D. Penelitian Terdahulu

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Lorong Garden (Longgar) di Kota Makassar, Puput Putri Anggun, Muhammad Salim, Rasmeidah Rasyid, 2018.

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Analisis, bertujuan untuk mengetahui karakteristik masyarakat yang bermukim di lokasi program lorong garden, untuk mengetahui partisipasi masyarakat kota Makassar terhadap program lorong garden dan untuk menganalisis hubungan faktor umur, pendidikan serta pendapatan dengan

partisipasi masyarakat terhadap program Lorong Garden di kota Makassar. Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat yang bermukim di lokasi Lorong Garden, teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan survey kuesioner. Analisis data dilakukan dengan teknik scoring dengan analisis Chi-Square. Dimana hasil dari penelitian ini adalah Partisipasi responden dalam kegiatan keberlanjutan Program Lorong Garden di kota Makassar dilihat dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan, tergolong tinggi sedangkan dalam kegiatan pengawasan tergolong rendah. Faktor umur, pendidikan dan pendapatan terdapat hubungan tidak nyata terhadap partisipasi responden dalam keberlanjutan program Lorong Garden di kota Makassar (tidak signifikan). Sehingga, hal ini berarti hipotesis pertama dan kedua ditolak.

2. Democratic Governance Dalam Program Lorong Garden Di Kelurahan Melayu Kecamatan Wajo (Studi Kasus Partisipasi Masyarakat Dalam Program Lorong Garden), Putri Intan Indah Kurniawati, 2018.

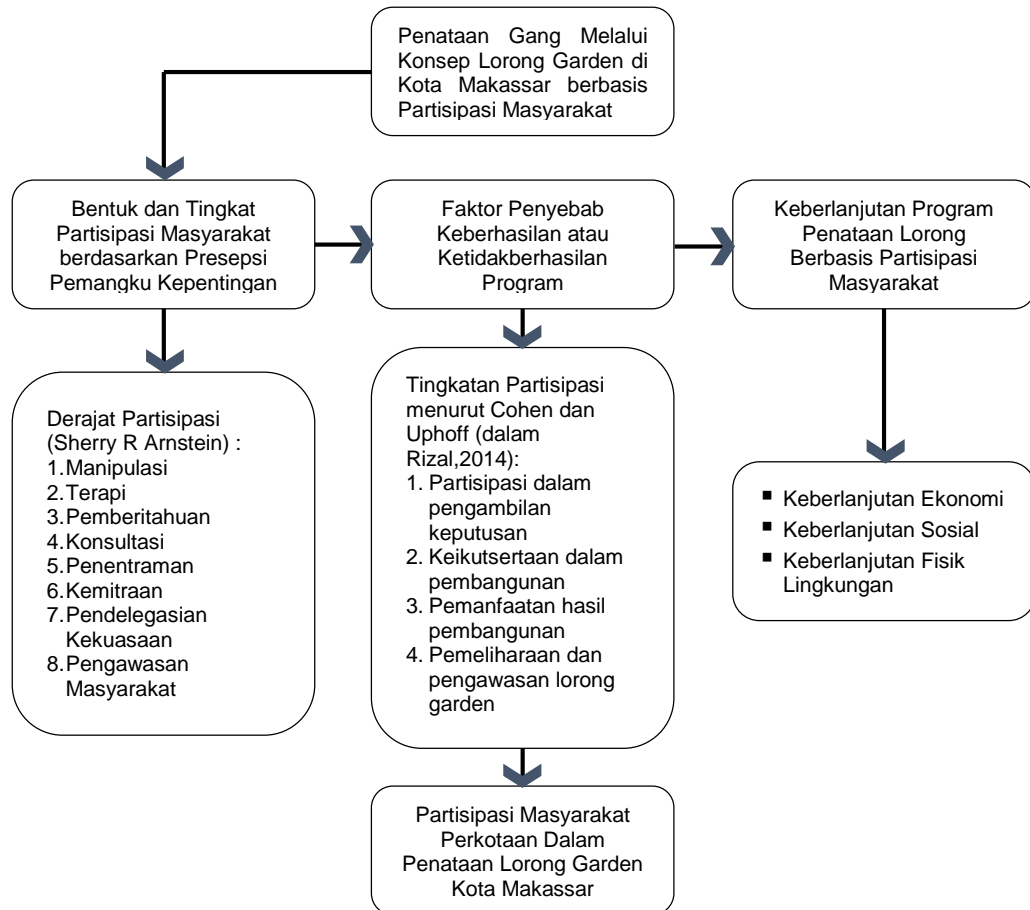
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat sebagai dimensi utama democratic governance dalam program Lorong Garden di Kel. Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar yang dilihat dari sarana prosedur dan metode, kolaborasi antara kelompok dan lembaga pemerintah, hubungan masyarakat dan penyedia layanan, kapasitas untuk berinovasi, dan belajar dari satu sama lain. Subjek dari penelitian ini adalah Lurah, Masyarakat, RT & RW, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Dimana hasil dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat sebagai dimensi utama democratic governance dalam program Longgar di Kel. Melayu Kec. Wajo sudah cukup tinggi. Akan tetapi masih ada sarana yang belum maksimal dalam menjangkau partisipasi masyarakat, yaitu sarana kolaborasi antara kelompok dan

lembaga pemerintahan serta belajar dari satu sama lain. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, tidak adanya forum khusus, dan kesibukan masyarakat di Kel. Melayu Kec. Wajo.

Hal yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah melihat bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap program Longgar dengan membandingkan tiga lokasi penerima program Longgar di Kota Makassar. Penelitian sebelumnya, Anggun (2018) melihat keberlanjutan program dari kegiatan penanaman dan pemeliharaan, sedangkan dalam pengawasan tergolong rendah partisipasinya. Kurniawati (2018) melihat metode dan prosedur partisipasi melalui penyedia layanan serta kapasitas berinovasi dalam program Longgar, Sehingga yang menjadi novelty dari penelitian ini adalah melihat partisipasi masyarakat dengan membandingkan tiga karakteristik lokasi, serta keberlanjutan program melalui strategi pengembangan dengan melihat faktor keberhasilan dan tidak berhasilnya program Longgar, sehingga dapat menjadi rujukan dan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Makassar dalam mengembangkan Program Longgar.

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan hasil kajian teori diatas, kerangka pikir penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian